

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
( RENJA )**

**TAHUN 2025**



**KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang merupakan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah tersusun. Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah dokumen perencanaan untuk periode pada Triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen ini, memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun kedepan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Renja Perubahan Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Rembang, 21 Juli 2025



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Rembang. ....	8
2.2 Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2025 .....	17
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.....	22
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. ....	23
2.5 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 .....	23
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 .....</b>	<b>35</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.2 Program dan Kegiatan.....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 .....	9
Tabel 2.2 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun 2025 .....	17
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun 2025 .....	22
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Rembang .....	26
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 .....	36
Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 .....	37

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA perubahan) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan Provinsi dan APBN Perubahan.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

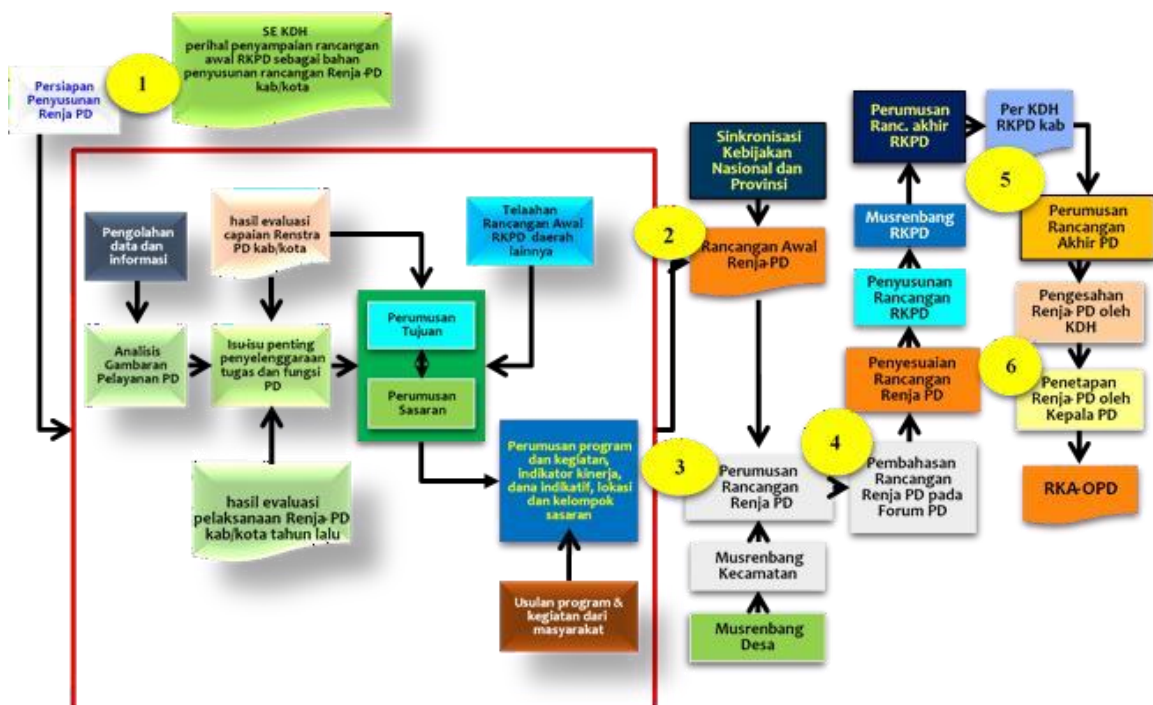
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Perubahan Renja terdiri dari tahap persiapan, Penyusunan Rancangan Awal, Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang

dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2025 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

**Rembang : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).**



Gambar 1.1

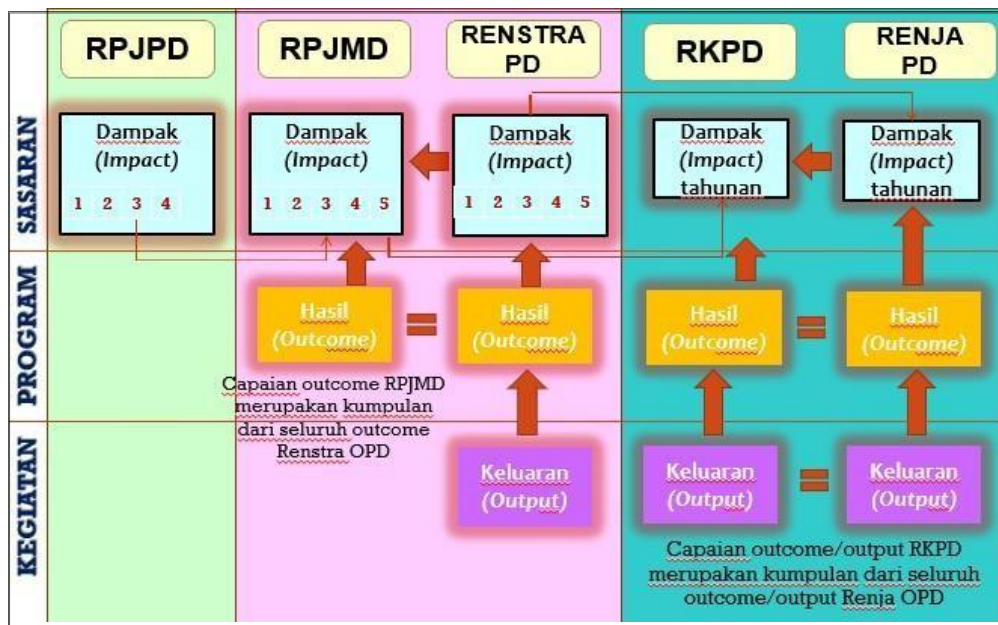
**Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja dengan tahapan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.1

Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta berRembang dari Renstra serta RKPD, sehingga arah perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

Gambar 1.2

Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 secara eksplisit merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Rembang pada tahun+1 yaitu tahun 2026 dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang –Undang Cipta kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Rembang nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
16. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 000.7/0632/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Rembang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2025 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2025 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Renja

semester I Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025;

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUPA -PPAS) Tahun 2025 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RAPBD) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2025.
4. Mengetahui isu- isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang beserta peluang dan tantangan yang dihadapi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.**

Bab ini memuat Latar Belakang perlunya Perubahan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Uraian Singkat tentang Sistematika penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025**

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah , Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada bab ini juga disajikan Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Triwulan I tahun 2025

**BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini Memuat penjelasan mengenai Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**BAB IV : PENUTUP.**

Bab ini memuat diantaranya Catatan penting yang harus mendapat perhatian, kaidah - kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Rembang.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

Evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selama kurun waktu Januari sampai dengan Maret tahun 2025. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut pemerintah daerah focus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan organisasi kejelasan aktivitas dan penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Dalam melakukan pengukuran

kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indicator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus menerus ditingkatkan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengukuran kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun 2025 dengan sasaran dan capaian sebagaimana **Tabel 2.1** berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Rembang

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcomed)/kegiatan( Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4*100				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
7	01	<b>KECAMATAN</b>											
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	63	65,90	63	0	0	66	104.8		
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	100	100	25	25	100	100.0	
7	01	01	2.01	01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	0	0	2	100.0
7	01	01	2.01	02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	1	50	2	100.0

7	01	01	2.01	07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	1	25	4	100.0
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</b>	100	100	100	25	25	100	100.0
7	01	01	2.02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	52	52	52	100	52	100.0
7	01	01	2.02	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	0	0	12	100.0
7	01	01	2.02	05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	100.0
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100	100	100	25	25	100	100.0
7	01	01	2.05	0002	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25	0	25	0	0	25	100.0
7	01	01	2.05	0003	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	3	1	33	3	100.0
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>% pemenuhan pelayanan umum</b>	100	100	100	25	25	100	100.0
7	01	01	2.06	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	01	2.06	02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	01	2.06	03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	01	2.06	04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	01	2.06	05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	3	25	12	100.0

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	3	25	12	100.0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>85</b>	<b>100.0</b>
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2		2		0	2	100.0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		1		0	1	100.0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Rembang Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Rembang Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	12	3	25	12	100.0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% BMD Dengan Kondisi Baik</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>90</b>	<b>100.0</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	16	16	2	13	16	100.0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	20	2	10	20	100.0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0

7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	100	100	100	25	25	100	100.0
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase PemDes yang lunas bayar PBB</b>	100	100	100	25	25	100	100.0
7	01	02	2.04	03	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	100	100	100	25	25	100	100.0
						<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>	24	27	24	27	113	27	112.5
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani</b>	100	100	100	25	25	100	100.0
						<b>persentase penetapan APBDesa &amp; penyampaian SPJ tepat waktu</b>							
7	01	03	2.01	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan</i>	10	10	10	10	100	10	100.0
7	01	03	2.01	03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Rata-Rata IKM Kelurahan</b>	62	85.19	62				na

<b>KELURAHAN KUTOHARJO</b>													
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	10	<b>10</b>	100	<b>10</b>	100.0
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1	1	1		0	1	100.0
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	10	<b>10</b>	100	<b>10</b>	100.0
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	12	12	<b>3</b>	25	<b>12</b>	100.0
<b>KELURAHAN SIDOWAYAH</b>													
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	10	<b>10</b>	100	<b>10</b>	100.0
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1	1	1		0	1	100.0
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	10	<b>10</b>	100	<b>10</b>	100.0
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	12	12	<b>3</b>	25	<b>12</b>	100.0

					<b>KELURAHAN TANJUNGSARI</b>								
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	10	<b>10</b>	100	<b>10</b>	100.0
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1	1	1		0	1	100.0
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	10	<b>10</b>	100	<b>10</b>	100.0
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	12	12	<b>3</b>	25	<b>12</b>	100.0
					<b>KELURAHAN GEGUNUNG KULON</b>								
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	10	<b>10</b>	100	<b>10</b>	100.0
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1	1	1		0	1	100.0
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	10	<b>10</b>	100	<b>10</b>	100.0
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	12	12	<b>3</b>	25	<b>12</b>	100.0
					<b>KELURAHAN MAGERSARI</b>								
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	10	<b>70</b>	700	<b>10</b>	100.0
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1	1	1		0	1	100.0
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	10	<b>10</b>	100	<b>10</b>	100.0

7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	12	12	3	25	12	100.0
					<b>KELURAHAN LETEH</b>								
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10	70	700	10	100.0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	1	1		0	1	100.0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	10	10	10	100	10	100.0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	12	12	3	25	12	100.0
					<b>KELURAHAN PACAR</b>								
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10	70	700	10	100.0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	1	1		0	1	100.0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	10	10	10	100	10	100.0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	12	12	3	25	12	100.0
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	100	100	100	25	25	100	100.0
7	01	04	2.03		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	100	100	100	25	25	100	100.0

7	01	04	2.03	01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	34	34	34	<b>34</b>	100	<b>34</b>	100.0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	95	100	95	25	26	95	100.0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	75	na	75			75	100.0
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	34	34	34	<b>34</b>	100	<b>34</b>	100.0

Dari data sebagaimana tabel 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2. tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021- 2026 sampai dengan semester I tahun 2025 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2025 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
- a. Evaluasi realisasi kinerja untuk periode tahun 2024 pada dasarnya setiap target telah dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan sebagaimana informasi pada tabel 2.1
  - b. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang masih dalam progrs target kegiatan kegiatan yang belum dapat terlaksana di awal tahun adapun capaian kinerja kegiatan dan anggaran pada tabel 2.1 dan 2.2
- 2.1.2 Faktor faktor penyebab ketercapaian target kinerja program/kegiatan:
- a. Faktor pendukung
    - Dukungan dan Kerjasama pihak pihak terkait dalam pelaksaan tugas.
    - Dukungan anggaran dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pegawai .
    - Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
    - Dorongan dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan baik yang bertanggung maupun yang tidak bertanggung untuk dilaksanakan dengan baik.
    - Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjalin sinergitas dengan OPD lintas sektoral kecamatan dan pemerintahan desa.
  - b. Faktor penghambat
    - Kecermatan perencanaan yang kurang utamanya dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam mendukung target
    - Keterbatasan SDM di lingkungan kecamatan Rembang

- Pemenuhan sarana prasarana yang belum memadai
- Tidak adanya Ketersediaan anggaran pada sub kegiatan tertentu yang tidak sesuai perencanaan sehingga menyebabkan pelaksanaannya terhambat.

2.1.3. Implikasi / dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Yakni:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target renstra Kecamatan Rembang Tahun 2021-2025 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran kecamatan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target rencana strategis 2021-2026 kecamatan Rembang yang telah di rencanakan berdampak pada rendahnya laporan kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Rembang sehingga Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal.

2.1.4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada dasarnya setiap kinerja akan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, untuk mengatasi hambatan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perlu diambil kebijakan/ tindakan

- Realokasi Rembangdaya untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan
- Evaluasi dan monitoring berkala dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Mengoptimalkan dukungan kerjasama lintas sektor

## **2.2. EVALUASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2025**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 d e n g a n Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sampai dengan Triwulan I tahun 2025 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**  
**Triwulan I Tahun 2025**

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025		
							Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1					2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>					<b>7,995,118,000</b>	<b>1,378,263,372</b>	<b>17.24</b>
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	63		<b>0</b>	<b>6,259,118,000</b>	<b>1,359,087,972</b>	<b>21.71</b>
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	<b>25</b>	<b>25</b>	-	-	-
7	01	01	2.01	01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		<b>0</b>	-	-	-
7	01	01	2.01	02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	1	50	-	-	-
7	01	01	2.01	07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1	25	-	-	-

7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</b>	100	25	25	<b>6,099,998,000</b>	<b>1,327,057,024</b>	21.76
7	01	01	2.02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	52	100	6,036,008,000	1,327,057,024	21.99
7	01	01	2.02	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12		0	63,990,000		0.00
7	01	01	2.02	05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	0		
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100	25	25	<b>14,700,000</b>	-	0.00
7	01	01	2.05	0002	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25		0	14,700,000		0.00
7	01	01	2.05	0003	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	1	33	-	-	0.00
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>% pemenuhan pelayanan umum</b>	100	25	25	<b>35,855,000</b>	<b>4,258,000</b>	11.88
7	01	01	2.06	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	3	25	2,000,000		0.00
7	01	01	2.06	03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	3	25	3,000,000		0.00
7	01	01	2.06	04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	3	25	16,500,000	2,978,000	18.05
7	01	01	2.06	05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	3	25	3,075,000		0.00
7	01	01	2.06	07	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	3	25	10,000,000		
7	01	01	2.06	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	25	1,280,000	1,280,000	100.00

7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</b>	85	25	29	<b>14,080,000</b>	-	0.00
7	01	01	2.07	05	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2		0	4,780,000		0.00
7	01	01	2.07	06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1		0	9,300,000		0.00
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	100	25	25	<b>72,765,000</b>	<b>24,526,448</b>	33.71
7	01	01	2.08	02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Rembang Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Rembang Daya Air dan Listrik yang disediakan</i>	12	3	25	44,400,000	9,183,948	20.68
7	01	01	2.08	04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>	12	3	25	28,365,000	15,342,500	54.09
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% BMD Dengan Kondisi Baik</b>	90	25	28	<b>21,720,000</b>	<b>3,246,500</b>	14.95
7	01	01	2.09	01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	16	2	13	13,600,000	2,970,500	21.84
7	01	01	2.09	06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20	2	10	8,120,000	276,000	3.40
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke camat</b>	100	25	25	<b>5,000,000</b>	-	0.00
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase PemDes yang lunas bayar PBB</b>	100	25	na	5,000,000	-	0.00
7	01	02	2.04	03	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12	3	25	5,000,000	-	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	100	25	25	1,699,500,000	14,175,400	0.00

						Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	24	27	113	1,699,500,000	14,175,400	0.83
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	25	25	-		
						persentase penetapan APBDesa & penyampaian SPJ tepat waktu			#DIV/0!	49,500,000	14,175,400	28.64
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	10	10	100	25,000,000	11,275,400	45.10
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	3	25	24,500,000	2,900,000	11.84
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-Rata IKM Kelurahan	62		0	1,650,000,000	-	0.00
					KELURAHAN KUTOHARJO				na	165,000,000	-	0.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	100		-	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		0	17,300,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	10	100	147,700,000		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	3	25			
					KELURAHAN SIDOWAYAH					238,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	100			

7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1		0	16,520,000		
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	100	221,480,000		
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	3	25			
					<b>KELURAHAN TANJUNGSARI</b>					<b>196,000,000</b>		
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	100			
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1		0	30,235,300		
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	100	165,764,700		
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	3	25			
					<b>KELURAHAN GEGUNUNG KULON</b>					<b>140,000,000</b>		
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	100			
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1		0			
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	100	140,000,000		
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	3	25			
					<b>KELURAHAN MAGERSARI</b>					<b>217,000,000</b>		
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	100			

7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1		0	37,950,000		
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	100	179,050,000		
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	3	25			
					<b>KELURAHAN LETEH</b>					<b>530,000,000</b>		
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	100			
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1		0	250,000,000		
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	100	280,000,000		
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	3	25			
					<b>KELURAHAN PACAR</b>					<b>164,000,000</b>		
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10	10	100			
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1		0	14,000,000		
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10	10	100	150,000,000		
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	12	3	25			
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	100	25	25	27,500,000	5,000,000	
7	01	04	2.03		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	100	25	25	27,500,000	5,000,000	

7	01	04	2.03	01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	34	<b>34</b>	100	27,500,000	5,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	95	25	26	4000000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rata-rata IKM Desa</b>	75		0	4000000	
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	34	<b>34</b>	100	4000000	

Dari Tabel 2.2 menggambarkan bahwa total APBD induk Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2025 senilai Rp. 7.995.118.000 (berdasarkan Peraturan Bupati Rembang nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Rembang realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 senilai Rp 1.378.263.372 ( 17,24 % )

### **2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Rembang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Rembang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator kinerja pelayanan.

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya mewujudkan kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dirumuskan dan dikaji berdasarkan format tabel T-C.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



## **2.4. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang maka hal tersebut akan memunculkan isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap pelayanan di Kecamatan Rembang.

Berikut uraian isu-isu penting sebagaimana dimaksud:

### **2.4.1 Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan**

Tingkat kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dapat dilihat berdasarkan capaian indikator urusan yang menjadi sasaran strategis dan program sebagaimana pada tabel 2.1. secara umum kinerja Kecamatan Rembang tergolong baik dikarenakan mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.

### **2.4.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pelayanan;**

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik
- b. Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

### **2.4.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional**

Dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari permasalahan diatas diantaranya adalah sebagai

berikut :

- a. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik ;
- b. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur Kecamatan.

#### 2.4.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, antara lain :

##### **a. Tantangan**

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Dinamika perkembangan masyarakat di lain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
- 4 Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
- 5 Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6 Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;

- 7 Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
- 8 Rendahnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- 9 Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

#### **b. Peluang**

1. Banyaknya tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah Daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat;
2. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBN/APBD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial;
3. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

2.4.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan. Rekomendasi dan catatan strategis menilik dari permasalahan, tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

- a. Program Inovasi “ **KOPI LELET MANTAP**” merupakan aplikasi portal Pelayanan Publik online Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang lebih mudah, Cepat dan Tanggap dalam pelayanan terhadap masyarakat .
- b. Kemudian dilakukan juga program inovasi **CHANTIKA** ( Chat Assistant Kopi Lelet Mantap ).
- c. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rembang merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;
- d. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Rembang;
- e. Terpenuhi ketersediaan sdm dan anggaran sesuai kebutuhan;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

## **2.5 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2025 berpedoman pada Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021- 2026, dimana tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 dengan tema Pembangunan “Pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan”.Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misike-2 daerah yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan upayapenanggulangan kemiskinan

berbasis Rembangdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”, dan Misi ke-7 daerah yaitu “Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, pemenuhan infrastuktur yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar terutama warga miskin, dan pengelolaan Rembang Daya Alam yang berkelanjutan.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 harus pula memperhatikan aspek keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Disamping hal-hal tersebut diatas, Review terhadap RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2025. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rencana Kerja Kecamatan Rembang diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.29 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Rembang**

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN REMBANG

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>7</b>						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>7</b>	<b>1</b>					<b>KECAMATAN</b>			<b>8,056,057,911</b>	<b>KECAMATAN</b>			<b>8,056,057,911</b>		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>63</b>	<b>6,477,682,911</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>63</b>	<b>6,477,682,911</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.01</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
7	1	1	2.01	1		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	
7	1	1	2.01	2		<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2		<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	
7	1	1	2.01	7		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>100</b>	<b>6,286,152,911</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>100</b>	<b>6,286,152,911</b>
7	1	1	2.02	1		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	6,215,052,911	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	6,215,052,911
7	1	1	2.02	3		<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	71,100,000	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	71,100,000
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Rembang	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	<b>14,700,000</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Rembang	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	<b>14,700,000</b>

7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Rembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25	14,700,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Rembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25	14,700,000	
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	-	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>% pemenuhan pelayanan umum</b>	<b>100</b>	<b>35,730,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>% pemenuhan pelayanan umum</b>	<b>100</b>	<b>35,730,000</b>	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	2,000,000	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	3,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	3,000,000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	16,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	16,500,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	2,950,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	2,950,000	
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	10,000,000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1,280,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1,280,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>85</b>	<b>14,080,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>85</b>	<b>14,080,000</b>	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Rembang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	4,780,000	Pengadaan Mebel	Kab. Rembang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	4,780,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	9,300,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	9,300,000	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>105,300,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>105,300,000</b>	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Rembang Daya Air dan Listrik	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Rembang Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	44,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Rembang Daya Air dan Listrik	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Rembang Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	44,400,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	60,900,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	60,900,000	



7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Rembang	Persentase pengelolaan APB Kelurahan yang akuntabel	65	1,500,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Rembang	Rata-Rata IKM Kelurahan	65	1,500,000,000
					<b>KELURAHAN KUTOHARJO</b>				<b>165,000,000</b>					<b>165,000,000</b>
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	-
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	165,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	165,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	
					<b>KELURAHAN SIDOWAYAH</b>				<b>338,000,000</b>					<b>338,000,000</b>
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	100,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	100,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	238,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	238,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	
					<b>KELURAHAN TANJUNGSARI</b>				<b>196,000,000</b>					<b>196,000,000</b>
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	-

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	196,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	196,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		
					<b>KELURAHAN GEGUNUNG KULON</b>				<b>140,000,000</b>					<b>140,000,000</b>	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	-	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	140,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	140,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		
					<b>KELURAHAN MAGERSARI</b>				<b>217,000,000</b>					<b>217,000,000</b>	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	25,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	25,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	192,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	192,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		
					<b>KELURAHAN LETEH</b>				<b>280,000,000</b>					<b>280,000,000</b>	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	19,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	19,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	261,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	261,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		
					<b>KELURAHAN PACAR</b>				<b>164,000,000</b>					<b>164,000,000</b>	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	-	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	164,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	164,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100</b>	<b>27,500,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100</b>	<b>27,500,000</b>	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	<b>100</b>	<b>27,500,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	<b>100</b>	<b>27,500,000</b>	
7	1	4	2.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34	27,500,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34	27,500,000	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	<b>95</b>	<b>1,250,000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	<b>95</b>	<b>1,250,000</b>	

7	1	6	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Rata-rata IKM Desa</b>	<b>70</b>	<b>1,250,000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Rata-rata IKM Desa</b>	<b>70</b>	<b>1,250,000</b>
7	1	6	2.01	5	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	34	1,250,000	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	34	1,250,000

Secara umum, Renja RKPD Kabupaten Rembang tahun 2025 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Rembang pada tahun 2025. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis. Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2025 yaitu mewujudkan good governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor **Nomor 6 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

##### B. SASARAN

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai.

Dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Rembang selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Rembang.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Rembang.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, sebagaimana **Tabel 3.1**, berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rembang**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	Angka	3.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	83,5	83	83.5	84	85	86

### 3.2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan Pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 -2026.

Program dan Kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2025 direncanakan berdasarkan Analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025.

Adapun rumusan perubahan rencana program dan pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 dirinci pada **Tabel 3.2**, berikut :

**Tabel 3.2**

**Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Rembang Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
7	<b>01 KECAMATAN</b>					11,813,928,000	7,995,118,000	8,056,057,911				12,005,000,000
7	<b>0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>7,258,728,000</b>	<b>6,259,118,000</b>	<b>6,477,682,911</b>			<b>64</b>	<b>7,287,500,000</b>
7	<b>0 0 2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	100	100	35,500,000			<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		100	39,000,000
7	0 0 2.01 01 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rembang	2	2	12,000,000			Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2	13,000,000
7	0 0 2.01 02 <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Rembang	2	2	10,000,000			Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2	11,000,000

7	0	0	2.01	07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang	4	4	13,500,000			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	15,000,000
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6,081,828,000</b>	<b>6,099,998,000</b>	<b>6,286,152,911</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<b>100</b>	<b>6,105,000,000</b>
7	0	0	2.02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang	58	52	5,976,948,000	6,036,008,000	6,215,052,911	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	52	6,000,000,000
7	0	0	2.02	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang	12	12	104,880,000	63,990,000	71,100,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12	105,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	<b>Kab. Rembang</b>	100	100	<b>27,500,000</b>	<b>14,700,000</b>	<b>14,700,000</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	<b>23,000,000</b>
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Rembang		25	7,500,000	14,700,000	14,700,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25	8,000,000
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Rembang	3	3	20,000,000	-		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3	15,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>% pemenuhan pelayanan umum</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>113,000,000</b>	<b>35,855,000</b>	<b>35,730,000</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<b>100</b>	<b>98,500,000</b>
7	1	1	2.06	1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Rembang	12	12	7,000,000	2,000,000	2,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12	8,000,000

7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Remban g	12	12	10,000,000	3,000,000	3,000,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	12	11,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Remban g	12	12	40,000,000	16,500,000	16,500,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	12	41,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Remban g	12	12	7,000,000	3,075,000	2,950,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	12	8,000,000
7	1	1	2.07	6	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Rembang	12	0	4,000,000			Pendapata n Asli Daerah (PAD)		4,500,000
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Remban g	12	12	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	12	-
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Remban g	12	12	25,000,000	1,280,000	1,280,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	12	26,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</b>	Kab. Remban g	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>137,500,000</b>	<b>14,080,000</b>	<b>14,080,000</b>	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	<b>90</b>	<b>139,000,000</b>
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Remban g	2	2	43,800,000	4,780,000	4,780,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	2	44,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Remban g	5	1	93,700,000	9,300,000	9,300,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	1	95,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	Kab. Remban g	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>183,400,000</b>	<b>72,765,000</b>	<b>105,300,000</b>	Pendapata n Asli Daerah	<b>100</b>	<b>186,000,000</b>



7	1	2	2.0 2		<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</b>	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	<b>Kab. Remban g</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>41,200,000</b>			Dana Alokasi Umum ( DAU)	<b>100</b>	<b>42,000,000</b>
7	1	2	2.02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Remban g	12	12	41,200,000			Dana Alokasi Umum ( DAU)	<b>12</b>	<b>42,000,000</b>
7	1	2	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani</b>	<b>Kab. Remban g</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>2,750,000</b>	Dana Alokasi Umum ( DAU)	<b>100</b>	<b>11,000,000</b>
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<b>Kab. Remban g</b>	12	12	10,000,000	5,000,000	2,750,000	Dana Alokasi Umum ( DAU)	12	11,000,000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>	<b>Kab. Remban g</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4,355,000,000</b>	<b>1,699,500,000</b>	<b>1,546,875,000</b>	Dana Alokasi Umum ( DAU)	<b>100</b>	<b>4,509,500,000</b>
7	1	3	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola</b>	<b>Kab. Remban g</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>155,000,000</b>	<b>49,500,000</b>	<b>46,875,000</b>	Dana Alokasi Umum ( DAU)	<b>100</b>	<b>161,000,000</b>
7	1	3	2.01	1	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	<b>Kab. Remban g</b>	10	10	45,000,000	25,000,000	25,000,000	Dana Alokasi Umum ( DAU)	10	46,000,000

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Remban g	12	12	110,000,000	24,500,000	21,875,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	115,000,000
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase pengelolaan APB Kelurahan yang akuntabel	Kab. Remban g	65	65	4,200,000,000	1,650,000,000	1,500,000,000		65	4,348,500,000
					<b>KELURAHAN KUTOHARJO</b>		Kab. Remban g			565,000,000	165,000,000	165,000,000			580,000,000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Remban g	10	10	24,000,000			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	25,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Remban g	1	1	170,000,000	17,300,000	-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1	175,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Remban g	10	10	185,000,000	147,700,000	165,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	190,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Remban g	12	12	186,000,000			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	12	190,000,000
					<b>KELURAHAN SIDOWAYAH</b>		Kab. Remban g			638,000,000	238,000,000	338,000,000			651,000,000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Remban g	10	10	6,000,000		-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	6,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Remban g	1	1	200,000,000	16,520,000	100,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1	205,000,000

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	10	10	242,000,000	221,480,000	238,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	250,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	12	12	190,000,000			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	12	190,000,000
					<b>KELURAHAN TANJUNGSARI</b>		Kab. Rembang			<b>596,000,000</b>	<b>196,000,000</b>	<b>196,000,000</b>			<b>610,500,000</b>
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Rembang	10	10	5,000,000		-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	5,500,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Rembang	1	1	250,000,000	30,235,300		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1	255,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	10	10	101,300,000	165,764,700	196,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	105,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	12	12	239,700,000		-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	12	245,000,000
					<b>KELURAHAN GEGUNUNG KULON</b>		Kab. Rembang			<b>540,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>			<b>555,500,000</b>
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Rembang	10	10	5,000,000			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	5,500,000

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Rembang	1	1	150,000,000			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1	155,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	10	10	245,000,000	140,000,000	140,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	250,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	12	12	140,000,000		-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	12	145,000,000
					<b>KELURAHAN MAGERSARI</b>		Kab. Rembang			<b>617,000,000</b>	<b>217,000,000</b>	217,000,000			<b>660,500,000</b>
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Rembang	10	10	5,000,000			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	5,500,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Rembang	1	1	250,000,000	37,950,000	25,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1	255,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Rembang	10	10	186,606,330	179,050,000	192,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	220,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Rembang	12	12	175,393,670			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	12	180,000,000
					<b>KELURAHAN LETEH</b>		Kab. Rembang			<b>680,000,000</b>	<b>530,000,000</b>	<b>280,000,000</b>			<b>697,000,000</b>

7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Kab. Rembang	10	10	10,000,000		-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	12,000,000
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	Kab. Rembang	1	1	170,000,000	250,000,000	19,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1	175,000,000
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Kab. Rembang	10	10	300,000,000	280,000,000	261,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	305,000,000
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	Kab. Rembang	12	12	200,000,000			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	12	205,000,000
					<b>KELURAHAN PACAR</b>		<b>Kab. Rembang</b>			<b>564,000,000</b>	<b>164,000,000</b>	<b>164,000,000</b>			<b>594,000,000</b>
7	01	03	2.02	01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<b>Kab. Rembang</b>	10	10	3,500,000			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	4,000,000
7	01	03	2.02	02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	Kab. Rembang	1	1	224,000,000	14,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1	250,000,000
7	01	03	2.02	03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<b>Kab. Rembang</b>	10	10	164,000,000	150,000,000	164,000,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10	165,000,000
7	01	03	2.02	04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	<b>Kab. Rembang</b>	12	12	172,500,000			DAU Tambahan Dukungan Pendanaan	12	175,000,000



						<i>Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>							DAU)			
7	1	6	2.05		Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa		Kab. Rembang	34	34	10,000,000			Dana Alokasi Umum (DAU)		34	11,000,000
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Kab. Rembang	34	34	10,000,000	4,000,000	1250000	Dana Alokasi Umum (DAU)		34	11,000,000

### **Pokok pokok Pikiran Usulan Program dan Kegiatan**

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang akan menampung Pokok pokok Pikiran DPRD Usulan Program dan Kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbangcam.

**Tabel 3.3**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Pemerintah kabupaten Rembang**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **1.1 Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Rembang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Rembang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

## 1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Rembang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

## 1.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini adalah perlu dilakukannya inovasi pelayanan dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait serta akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kabupaten Rembang Tahun 2025 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2025.

Rembang, 21 Juli 2025



CAMAT REMBANG  
KECAMATAN  
REMBANG  
**ABDUR ROUF, S.STP., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19821029 200112 1 002